

Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali

Irnayanti Asnawai ¹; M. Najib Husain ²; Faturachman Alputra Sudirman ³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, irnayantiasnawi429@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ulunambo, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan, dan data lain yang dapat menjadi pendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi tiga tahap yaitu; wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Hubberman (1992) yang meliputi proses reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian bantuan PKH dilihat dari pendekatan program belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena tidak sesuai dengan prosedur yang masyarakat inginkan. Evaluasi kebijakan PKH di Kelurahan Ulunambo dianalisis menggunakan teori William Dunn (2003) dengan melihat *dimensi pemerataan, kecukupan, dan ketepatan*. Dampak pencapaian PKH sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat merubah kondisi ekonomi menjadi baik. Selain itu, berdampak pada pendidikan anak-anak yang dapat dipenuhi dari bantuan PKH tersebut. Dapat dikatakan pelaksanaan PKH memberikan dampak besar bagi masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin.

Kata kunci : *Evaluasi, Kebijakan, PKH.*

Abstract

This study aims to determine the Implementation and Evaluation of the Policy for the Family Hope Program (PKH) in Ulunambo Village, Menui Islands District, Morowali Regency. The study used a qualitative descriptive method. The data is obtained directly from the results of interviews in the field, and other data that can support the research. Data collection techniques used include three stages, namely; interviews, observations and documentation. The data analysis technique uses the Milles and Hubberman (1992: 16) model which includes the process of data reduction, presentation and verification. The results of the study indicate that the distribution of PKH assistance from the program approach has not fully gone well, because it is not in accordance with the procedures that the community wants. Evaluation of PKH policy in Ulunambo Village was analyzed using the theory of William Dunn (2003: 610) by looking at the dimensions of equity, adequacy, and accuracy. The impact of achieving PKH is very beneficial for the community because it can change economic conditions for the better. In addition, it has an impact on children's education which can be fulfilled from the PKH assistance. It can be said that the implementation of PKH has a major impact on the community, namely improving the welfare of the poor.

Keywords : *Evaluation, Policy, PKH.*

Pendahuluan

Masalah kemiskinan menjadi sentral yang harus segera ditanggulangi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Bicara mengenai kemiskinan, di negara Indonesia sendiri kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan yang harus dikaji secara terus menerus. Selama ini telah banyak program-program pemerintah yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan, namun tidak dapat dipungkiri upaya tersebut sering kali masih belum menghasilkan sesuatu penyelesaian seperti yang diharapkan. Melihat hal tersebut, pemerintah pun tidak tinggal diam, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terus pemerintah lakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perkembangan seperti itu terbukti negara Indonesia dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun, terlihat dari data BPS jumlah penduduk miskin ditahun 2007 berturut-turut menurun sampai tahun 2019. Sama halnya di kota yang penulis jadikan lokasi penelitian yaitu Kelurahan Ulunambo yang mengalami penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya yang sangat signifikan.

“Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menagani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial” Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun di daerah. Pada pelaksanaannya PKH ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), PT POS Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

Dasar hukum tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dimana peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah bisa dikatakan sudah mencapai keberhasilan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintahan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), melalui PKH pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya melalui

pemberian dana bantuan untuk menyekolahkan anak mereka dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. PKH berupa bantuan tunai yang dikhususkan pada pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam proses pelebagaan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Selain dari hal tersebut, PKH pun mampu membawa perubahan untuk masyarakat miskin menjadi mampu perekonomiannya. Terlihat dari data jumlah peserta PKH di Kelurahan Ulunambo tahun 2019 Dari data jumlah peserta PKH Kecamatan Menui Kepulauan peneliti mengambil salah satu tempat penelitian di Kelurahan Ulunambo yang dinilai yang memiliki banyak jumlah peserta PKH nya dibanding dengan kecamatan lain.

Di Kecamatan Menui Kepulauan, penerima Program Keluarga Harapan Tahun 2019 jumlah penerima PKH 127 keluarga, dalam 1 Kelurahan dan pendamping PKH sebanyak 1 orang, dimana para pendamping ini setiap orangnya mengurus peserta PKH 127 keluarga. Selain dari hal tersebut, namun dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan di Kecamatan Menui Kepulauan terdapat beberapa masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan dari program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri.

Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah menganalisis tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah terhadap PKH di Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. penelitian ini menjadi fokus analisisnya yaitu variabel Evaluasi dan PKH yang mengacu pada pendapat Wilian Dunn (2003) adapun dimensi-dimensi yaitu pemerataan, kecukupan, ketepatan. Telah banyak studi yang meneliti mengenai evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Indonesia Seperti Kurniawan et al., (2021) yang mengambil lokasi di kecamatan Karawang Barat, Damayanti (2016) di Kabupaten Probolinggo, dan Jaelani (2022) di Kabupaten Serang. Namun dari berbagai studi tersebut belum ada yang mengevaluasi di Kelurahan Ulunambo, Kabupaten Morowali. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui kepulauan Kabupaten Morowali.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan hubungan antara fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian di Kelurahan Ulunambo, Kecamatan Menuai Kepulauan, Kabupaten Morowali. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah perangkat kelurahan, pendamping PKH dan warga

penerima PKH. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis dengan langkah mereduksi data, menyajikan dan memverifikasi. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), menggunakan penelekanat William Dunn (2003:) dengan mengungkap *dimensi pemerataan, kecukupan, dan ketepatan* dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ulunambo, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali. Adapun metode yang dipilih untuk menganalisa data adalah metode analisa interaktif, Miles Huberman mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Ulunambo sudah memasuki tahun ke 12 dihitung dari 2007 sampai dengan 2019 Dalam upaya pelaksanaannya, peneliti menemukan hasil evaluasi dari pelaksanaan program ini di tahun 2019. Terlihat dari beberapa harapan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) serta keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan.

Pada pembahasan Evaluasi ini peneliti melakukan wawancara kepada peserta Program Keluarga Harapan dan pendamping Program Keluarga Harapan untuk mengetahui seberapa jauh hasil Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ulunambo, Kecamatan Menui Kepulauan. Pertanyaan wawancara peneliti ambil dari perdimensi dari William N. Dunn, terdapat enam kriteria penilaian Evaluasi tersebut

A. Dimensi Pemerataan

Perataan erat kaitannya dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Pemerataan program keluarga harapan merupakan manfaat yang diterima oleh peserta pkh disalurkan secara merata. Jadi dengan kata lain perataan berkaitan dengan keadilan untuk masyarakat.

Dimensi Pemerataan memiliki pertanyaan pokok berupa apakah manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat. maka dalam kriteria ini terdapat dua indikator, di antaranya:

1. Kesesuaian dan ketepatan dana bantuan Program Kelurga Harapan
2. Pemerataan pelaksana Program Kelurga Harapan dalam memilih peserta Program Kelurga Harapan

Muh.Ali Rasid (41 tahun) selaku kepala seksi kesejahteraan sosial Kelurahan Ulunambo beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan maka kami tentunya melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui kriteria masyarakat yang pantas untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, dan yang menjadi sasaran kami yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah kurang dari 500.000, anak sekolah, dan program keluarga harapan pada lansia dan yang berstatus janda hal ini kami gunakan untuk meminimalisir terjadinya indikasi kecurangan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan”. (wawancara, Mei 2021)

Dalam wawancara di Kelurahan Ulunambo disimpulkan bahwa masyarakat yang pantas untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dan yang menjadi sasaran yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah kurang dari Rp 500.000.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada salah seorang warga penerima Program Keluarga Harapan (Program Keluarga Harapan) Suriati (45 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya sebagai masyarakat penerima bantuan Keluarga Harapan Pemerintah setempat telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban pemerintah setempat, rata-rata yang menerima Program Keluarga Harapan di sini yaitu kategori masyarakat yang kurang mampu”. (wawancara, Mei 2021).

Dalam wawancara di Kelurahan Ulunambo disimpulkan bahwa pemerintah setempat telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban pemerintah setempat, rata-rata yang menerima Program Keluarga Harapan di sini yaitu kategori masyarakat yang kurang mampu.

Selanjutnya penulis akan wawancarai Elti (36 tahun) selaku masyarakat setempat beliau menyatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan pemerintah memberikan ke pada masyarakat yang memiliki kriteria pantas untuk menerima bantuan PKH tersebut seperti halnya kriteria yang masuk dalam komponen pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan sosial, hal itu yang menjadi patokan pemerintah dalam menentukan siapa siapa saja yang pantas dalam mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan”. (wawancara, Mei 2021)

Dalam wawancara di Kelurahan Ulunambo disimpulkan kriteria yang masuk dalam komponen pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan sosial pemerintah dalam menentukan siapa saja yang pantas dalam mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan. Namun berdasarkan hasil wawancara informan yang lain di temukan bahwa yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan tidak sesuai kriteria Susianti (34 Tahun) Kelurahan Ulunambo menyatakan bahwa:

“sejauh yang saya tau, di Kelurahan Ulunambo itu belum semua masyarakat yang tergolong tidak mampu dapat dana bantuan dari Program Keluarga Harapan. dan verifikasi berkas bukan dari kelurahan melainkan dari pusat”. (wawancara, Mei 2021)

Dalam wawancara di Kelurahan Ulunambo disimpulkan bahwa belum semua masyarakat yang tergolong tidak mampu mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan. Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh salah satu penerima bantuan Program Keluarga Harapan Dariati (38 Tahun) menyatakan bahwa:

“ya belum merata, di Kelurahan Ulunambo masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat dana bantuan Program Keluarga Harapan”. (wawancara, Mei 2021).

Dalam wawancara di Kelurahan Ulunambo disimpulkan masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat dana bantuan Program Keluarga Harapan. Selanjutnya wawancara selaku keluarga penerima manfaat Baharia menyatakan bahwa:

“iya, saya rasa tidak merata. Keluarga saya punya anak kelas 2 SD pengen dapat uang dari pemerintah juga buat sekolah anaknya tapi gak dapat. kemarin sempat ke rumahnya pak lurah tapi kata pak lurah disuruh sabar dek karena bukan pak lurah yang mengatur siapa aja yang dapat tapi dari pusat, ungkapnya”. (wawancara, Mei 2021)

Dalam wawancara di Kelurahan Ulunambo disimpulkan masih ada keluarga yang memang membutuhkan bantuan tersebut namun tak dapat bantuan tersebut. Dan hasil penjelasan wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk Kelurahan Ulunambo dalam hal pemerataan Program Keluarga Harapan belum sesuai. Hal itu ditandai dengan masih terdapatnya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan. Selain wawancara, bukti lain yang memperkuat adanya ketidak merataan pada proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dari data tersebut dapat terlihat bahwa jumlah masyarakat prasejahtera yang mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan belum mencakup semua penduduk prasejahtera di Kelurahan Ulunambo secara keseluruhan. Proses tidak meratanya sebaran peserta Program Keluarga Harapan disebabkan oleh konsep dasar dari Program Keluarga Harapan yaitu menjangkau rumah tangga yang sangat miskin dalam sebarannya jadi bisa dikatakan masyarakat yang masih tergolong miskin dalam hal sosial ekonomi belum bisa menjadi syarat untuk mendapatkan dana Program Keluarga Harapan. Mereka yang tergolong miskin masih bisa mendapatkan dana bantuan dari program pemerintah yang lain misalnya dari Raskin, jamkesmas dan lain-lain.

B. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan program keluarga harapan berkaitan dengan sejauh mana kepuasan peserta program keluarga harapan sebagai sasaran program di dalam mencukupi kebutuhannya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan beberapa tujuan tersebut secara tidak langsung akan terbantu misalnya dalam hal pengurangan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan angka kematian ibu melahirkan.

Wawancara yang penulis lakukan kepada sala satu informan yaitu Suriati (45 tahun) beliau menyatakan bahwa:

“Yang saya lihat, Program Keluarga Harapan ini sudah cukup berhasil apalagi di Kelurahan Ulunambo dan walaupun memang tidak diteruskan setidaknya untuk ibu-ibu yang anaknya terbantu ya disyukuri saja”. (wawancara, Mei 2021).

Dari hasil penjelasan wawancara penulis simpulkan bahwa penerima Program Keluarga Harapan sudah cukup menghasil apa lagi di Kelurahan Ulunambo anak sangat terbantu dan bersyukur adanya bantuan ini. Tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah membantu meringankan beban ekonomi dala upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Apabila dilihat dari perspektif pembangunan Program Keluarga Harapan berupaya untuk memberi sumber daya kepada orang yang kurang berbakat atau yang mempunyai kemampuan yang kurang lebih setara dengan anggota masyarakat lain. Bersumber dari pemahaman nilai keadilan dalam perspektif ini, Program Keluarga Harapan merupakan kebijakan diskriminatif untuk tujuan positif. Hal itu disebabkan karena pemenuhan diartikan sebagai distribusi sumber daya secara adil tetapi tidak merata, sebab kebutuhan orang berbeda. wawancara dilakukan dengan Muh.Ali Rasis (41 Tahun) selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Ulunambo menyatakan bahwa:

“Untuk peserta Program Keluarga Harapan, beban mereka di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi lebih ringan. Yang memiliki anak balita misalnya, mereka dapat memperoleh imunisasi lengkap, berat badannya ditimbang secara rutin serta memperoleh vitamin A secara rutin dari posyandu. Selain itu juga mereka mendapatkn bantuan berupa dana yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan dan keperluan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kesehatan balita. Dan untuki ibu hamil, selain

mendapat dana bantuan, mereka juga mendapatkan pemeriksaan kehamilan secara gratis diposyandu serta kalo mau melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih seperti dokter atau bidan. Dan untuk bidang pendidikan, pihak sekolah tidak memungut biaya pendidikan untuk peserta Program Keluarga Harapan". (wawancara, Mei 2021).

Dari hasil penjelasan wawancara disimpulkan bahwa, adanya Program Keluarga Harapan sangat terbantu sekali bantuan berupa dana yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan dan keperluan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kesehatan balita. Dan untuki ibu hamil, selain mendapat dana bantuan, mereka juga mendapatkan pemeriksaan kehamilan secara gratis diposyandu serta kalo mau melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih seperti dokter atau bidan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hartini menyatakan bahwa: "saya tidak lagi bingung memikirkan biaya pendidikan atau kesehatan untuk anaknya karena dana bantuan Program Keluarga Harapan sudah mencukupi keperluan pendidikan ataupun kesehatan keluarga. Untuk keperluan pendidikan, anak dari peserta Program Keluarga Harapan". (wawancara, Mei 2021).

Dari hasil penjelasan wawancara di Kelurahan Ulunambo mereka tidak lagi bingung memikirkan biaya pendidikan atau kesehatan untuk anaknya karena dana bantuan Program Keluarga Harapan sudah mencukupi keperluan pendidikan ataupun kesehatan keluarga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Irmayanti (27 Tahun) dari Kelurahan Ulunambo mengatakan bahwa:

"Dana bantuan yang kita terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak karena anak saya sudah tidak dikenakan biaya pendidikan jadi dana bantuan yang diperoleh dapat saya pergunakan untuk membeli berbagai perlengkapan yang terkait dengan pendidikan anak saya. Ya terkadang buat beli sayur juga". ". (wawancara, Mei 2021)

Dari hasil penjelasan wawancara di Kelurahan Ulunambo Dana bantuan yang diterima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak karena anak tidak dikenakan biaya pendidikan.

Namun berdasarkan temuan lain ada salah seorang informan Dariati (38 tahun) yang menyatakan bahwa:

"belum mencukupi karena selama menerima bantuan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Ulunambo kondisi ekonomi saya masih seperti ini tidak ada perubahan sama sekali".(wawancara mei 2021)

Dari hasil penjelasan wawancara di Kelurahan Ulunambo belum mencukupi karena selama menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Ulunambo belum kondisi ekonomi tidak meningkat.

C. Ketepatan

Ketepatan erat hubungannya dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan program keluarga harapan mengacu pada apakah tujuan atau nilai program dapat mengakomodir fakta program keluarga harapan di lapangan. Pada Program Keluarga Harapan sendiri standart tingkat keuntungan sangat sesuai dengan nilai yang berlaku pada peserta Program Keluarga Harapan.

Untuk mengetahui tingkat ketepatan dari Program Keluarga Harapan, peneliti mencoba melakukan wawancara dengan beberapa informan. Informan pertama yaitu Wawancara yang penulis lakukan kepada sala satu informan yang bernama Hartini (43 tahun) beliau menyatakan bahwa:

“masyarakat yang menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan tersebut benar-benar memiliki keadaan perekonomian yang rendah sehingga telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menjadi peserta di dalam program Program Keluarga Harapan. Sebelum menjadi peserta Program Keluarga Harapan, mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, seperti kebutuhan alat tulis maupun seragam sekolah. Uang yang mereka miliki diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Tetapi setelah adanya bantuan Program Keluarga Harapan mereka tidak lagi bingung memikirkan biaya”. (wawancara, Mei 2021)

Dari hasil penjelasan wawancara disimpulkan bahwa, di Kelurahan Ulunambo menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan tersebut benar-benar memiliki keadaan perekonomian yang rendah sehingga telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menjadi peserta di dalam program Program Keluarga Harapan. Sebelum menjadi peserta PKH. Wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu informan yaitu Suriati (45 tahun) menyatakan bahwa:

“karena di wilayah ini ya di Kelurahan Ulunambo, mau sekolah saja sudah untung. Sejak adanya Program Keluarga Harapan, Mereka mau semua sekolah. ”. (wawancara, Mei 2021)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan para ibu peserta Program Keluarga Harapan mempunyai semangat untuk menyekolahkan anak. Dari wawancara yang lain informan masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan Susianti (34 tahun) menyatakan bahwa:

“di wilayah Kelurahan Ulunambo masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan tidak semua keadaan perekonomian yang rendah kurang dari Rp. 500.000”. (wawancara mei 2021)

Dari wawancara dapat di simpulkan tidak semua yang menerima Program Keluarga Harapan perekonomian rendah di bawah Rp. 500.000 melainkan ada juga yang menerima Program Keluarga Harapan masih dikategorikan mampu. Senada dengan wawancara yang dilakukan salah seorang Dariati (38 tahun) menyatakan bahwa:

“orang yang masih di kategorikan mampu masih terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan menunjukkan ketidak propesional pendamping”. (wawancara mei 2021)

Dari wawancara dapat disimpulkan tidak tepat karena masih ada yang mampu tapi masih menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Tabel 1. Hasil Dimensi Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Ulunambo

No	Dimensi Evaluasi	Kesimpulan
1	Pemerataan	Masih ada masyarakat yang tergolong tidak mampu belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan
2	Kecukupan	Masyarakat belum merasa cukup pada bantuan Program Keluarga Harapan
		Kondisi ekonomi masyarakat tidak ada perubahan sama sekali
3	Ketepatan	Tidak semua masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan memiliki penghasilan rendah

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

Berdasarkan tabel 1 diketahui pada aspek pemerataan masih ada masyarakat yang tergolong tidak mampu belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kecukupan disimpulkan masyarakat belum merasa cukup pada bantuan Program Keluarga Harapan, Kondisi ekonomi masyarakat tidak ada perubahan sama sekali. Dan ketepatan disimpulkan tidak semua masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan memiliki penghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan studi Razali (2020); Dehani (2018); Ilo (2020) bahwa masih ditemukan kekurangan dan masalah dalam pelaksanaan PKH baik pada aspek pemerataan, kecukupan, ketepatan.

Kesimpulan

Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali dilihat dari pendekatan menurut Wilian Dunn (2003:610) pun belum sepenuhnya berjalan dengan baik hal ini di lihat dari Dimensi Pemerataan bahwa dalam penerima Program Keluarga Harapan belum merata bagi masyarakat di Kelurahan Ulunambo, dan Dimensi kecukupan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Ulunambo belum semua merasa cukup dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan, serta pada Dimensi Ketepatan juga belum menunjukan tepat pada proses pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan bagi masyarakat setempat.

Referensi

- Damayanti, A. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 15-19.
- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45-56.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta.: Gadjah Mada University Press
- Ilo, W. D. F. Z. A. (2020). EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI NAGARI TANJUANG BUNGO KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. *Jurnal Manajemen Kompeten*, 2(2).
- Jaelani, A. M., Rahmatulloh, F. S., Febriyanti, I., & Cecilia, P. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadugenep Kabupaten Serang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 26-36.
- Kurniawan, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 040-051.
- Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. (1992). *Analisis data kualitatif Terj. Tjejep Rohidi*. Jakarta : UI Press.
- Peraturan Menteri Nomor Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Razali, M. T., & Putri, M. D. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018. *Jurnal Kemunting*, 1(1), 58-83.